© 2004 Hardian
Makalah pribadi
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702)
Sekolah Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
Mei 2004

Posted 30 May 2004

Dosen:
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (penanggung jawab)
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto
Dr Ir Hardjanto

OTONOMI DAERAH SEBUAH SOLUSI ATAU MENAMBAH KONFLIK PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Oleh:

Hardian

P062034261

hardian_ayah@yahoo.com

Konsep dasar dari Otonomi Daerah adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka butuhkan, dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah seperti masalah moneter, pembangunan jalan antar kota dan provinsi, maupun pemeliharaan sistem pengairan yang melintasi berbagai wilayah.

Yang dimaksud dengan **Otonomi daerah** adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan **Daerah otonom** adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan Otonomi daerah guna mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, pada tahun 1997 lahir Undang-Undang Republik Indonesia No.18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disusul dengan lahirnya peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 19/1997 tentang Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah No. 20/1997 tentang Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 21/1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tujuan dari pengembangan Otonomi Daerah adalah :

- a. Memberdayakan masyarakat.
- b. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat.
- d. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Dalam pemahaman penggunaan istilah perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah **desentralisasi** dan **dekonsentrasi**, desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah; sedangkan dekonsentrasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah.

Sesuai dengan ketetapan MPR-RI No.XV/MPR/1998, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Prinsip desentralisasi melalui peningkatan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi perhatian pemerintah dalam proses sinkronisasi tersebut, karena peningkatan otonomi daerah khususnya dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, juga merupakan kebijakan politik dan ekonomi Pemerintah Pusat. Kedua fenomena ini harus dirangkum sedemikian rupa agar tercipta suasana kondusif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga terdapat harmonisasi dalam menjalankan kebijakan fiskal nasional dan kebijakan fiskal daerah.

Peta konflik pengelolaan sumberdaya alam sebelum dan setelah Otonomi Daerah

Dalam amatan secara kasat mata tidak banyak perubahan peta konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan, atau kata lainnya yang lebih ekstrim untuk pemuasan kebutuhan yang tidak terbatas. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia sudah berlangsung sejak lama, dan ini adalah sangat manusiawi, yang jadi persoalan adalah dampak negatif dari kesalahan dalam pengelolaan tersebut. Di Indonesia kerusakan alam dan lingkungan sangat signifikan terjadi sejak orde baru, bahkan sampai era yang disebut sebagai era reformasi hal ini malah semakin tidak terkendali.

Eksplorasi sumber daya hutan memainkan peranan penting dalam memacu laju pembangunan ekonomi Indonesia sejak awal tahun 1970-an. Namun keuntungan dari pembalakan dan industri kehutanan lainnya sebagian besar mengalir masuk untuk suatu kelompok tertentu yang terdiri dari kerabat dan kroni keluarga elit Soeharto, para pendukungnya di dalam pemerintahan. Sementara biayanya ditanggung oleh masyarakat setempat dan masyarakat adat.

Berbagai sistem hak adat atas hutan dan berbagai sistem pengelolaan sumber daya secara tradisional yang berumur ratusan tahun dihapus demi 'pembangunan' dan berdasarkan kebijakan nasional menyebutkan bahwa pemerintah pusat 'memiliki' 75 % kawasan lahan negara yang secara resmi merupakan lahan hutan. Masyarakat lokal tidak boleh mengakses sumberdaya hutan yang selama ini merupakan sumber penghidupan mereka, disisi lain hutan mereka dibalak, dibakar, dan dibuka secara serampangan untuk perkebunan yang menimbulkan erosi, banjir, kekeringan, serta banyak menghilangkan plasma nuftah asli yang sebelumnya dimanfaatkan oleh

masyarakat lokal. Program transmigrasi juga menyita jutaan hektar lahan dalam berbagai kawasan hutan, dan membawa jutaan pendatang baru ke dalam area yang sebelumnya berhutan dan berpenduduk jarang.

Konflik antara masyarakat dan berbagai proyek eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah dan sektor swasta telah menjadi masalah menahun dan berkembang di Indonesia sekurang-kurangnya semenjak tahun 1970-an. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat selama pemerintahan orde baru mengakibatkan ketidakpuasan, serta kecurigaan terhadap pemerintah. Sejak kejatuhan orde baru, berbagai konflik di kedua belah pihak menjadi semakin kompleks dan bertambah hebat.

Perusahaan HPH, telah lama menjadi sumber ketegangan dan konflik berkala antara perusahaan-perusahaan pembalakan dan negara di satu pihak, dan masyarakat lokal di lain pihak. Pada bulan Maret 2000, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) melaporkan bahwa 50 perusahaan kayu, yang mengontrol sekitar 10 juta ha HPH di Irian Jaya, Kalimantan dan Sulawesi telah menghentikan berbagai kegiatan pembalakan mereka karena masalah yang berkembang dengan masyarakat lokal, yang tidak hanya menuntut kepemilikan terhadap lahan yang dikelola oleh perusahaan, tetapi juga sering mengancam para pekerja perusahaan.

Pembalakan ilegal juga merupakan sebab dan sekaligus akibat dari ketegangan atas sumber daya. Pembalakan ilegal ini menghasilkan kemarahan masyarakat lokal karena kayu-kayu dicuri dari lahan mereka, dan juga karena pembalakan ilegal ini menimbulkan konflik horisontal di dalam masyarakat karena adanya beberapa penduduk yang dipekerjakan (dan mengambil keuntungan) dalam operasi pembalakan ilegal tersebut, sementara penduduk lainnya menderita

karena dampak yang timbul seperti penyusutan air, erosi, dan kebakaran hutan.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit dan areal hutan tanaman industri yang berlangsung pesat di lahan-lahan hutan memicu kerenggangan hubungan dengan masyarakat lokal, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Pada umumnya pola kejadiannya adalah:

1. Lahan dimana masyarakat lokal memiliki klaim jangka panjang, baik ditanami tanaman perkebunan ataupun hasil-hasil hutan nonkayu diambil oleh masyarakat, ternyata dialokasikan untuk perusahaan tanpa merundingkannya dengan masyarakat;
2. Penduduk mengajukan protes kepada perusahaan dan para pejabat lokal, dan perusahaan sering memberi janji ganti rugi, menjanjikan keterlibatan dalam program perkebunan, atau berbagai tawaranlainnya;
3. Perusahaan tidak menepati janjinya dan masyarakat kembali mengajukan berbagai protes kepada pemerintah daerah dan para pegawai perusahaan;
4. Tidak ada tindakan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat, maka penduduk bertindak, menghancurkan atau mengambil alih peralatan dan berbagai kendaraan, menduduki pondok kerja HPH dan melarang karyawan perkebunan bekerja;
5. Perusahaan menyewa polisi setempat atau tentara (kadang berpakaian seperti kostum 'ninja' yang terkenal sebagai penjahat dan pembunuh bayaran yang kejam di Jawa) untuk membalas dendam, dan berbagai peristiwa kekerasan lain.

Taman Nasional dan kawasan lindung lainnya juga sering merupakan arena konflik. Sejak tahun 1998, perambahan ke dalam kawasan lindung meningkat secara dramatis, sebagaimana halnya

dengan Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah, dimana penduduk lokal telah mengambil alih ribuan ha untuk menanam berbagai tanaman keras dan menebang kayu. Hal serupa terjadi di TN Kutai di Kalimantan Timur. Pembalakan ilegal yang terorganisir juga dilaporkan terjadi di TN Leuser di Aceh dan TN Tanjung Puting di Kalimantan Tengah.

Dengan terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah di daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam menggali setiap potensi yang ada di daerahnya untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab. Adanya otonomi daerah, pemerintah pusat mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk mulai bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing-masing sehingga pada gilirannya nanti subsidi pemerintah pusat tidak lagi merupakan bahagian sumber dana yang dominan, melainkan menjadi sumber dana pelengkap saja.

Beberapa fenomena negatif muncul dalam pengelolaan sumberdaya alam yang disebabkan oleh implementasi Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena negatif ini muncul karena upaya pemaksaan diri dari pemerintah daerah untuk dapat menghimpun sebanyak-banyaknya pemasukan daerah dalam upaya menuju kemandirian daerah untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah, fenomena dapat melahirkan keadaan sebagai berikut:

1. Terjadinya saling tarik menarik penguasaan pengelolaan aset perusahaan pertambangan yang sumberdaya alam antara pusat dan daerah, contoh: PT. Semen Padang, PT. Semen Gersik dll.
2. Munculnya keinginan disintegrasi dari Propinsi induk terhadap Daerah Kota dan Kabupaten untuk membentuk propinsi sendiri yang Perusahaan pengegelolaan sumberdaya alam berada diwilayah kota dan kabupaten. Contoh : Bangka Belitung, Riau Kepulauan dll.
3. Karena Daerah perbatasan yang potensil sumberdaya alamnya untuk menghasilkan PAD maka terjadi kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dari Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan sumberdaya alam, sehingga jalinan kerjasama antar Pemerintah Propinsi cenderung berbenturan, contoh Prop, Sumatera Barat, Prop. Jambi, Prop. Riau.

Penutup

Alam dan segala isinya adalah karunia dan amanah tuhan, semuanya memberikan manfaat kepada manusia, pemanfaatan secara lestari merupakan kewajiban kita untuk kemakmuran generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Disisi lain manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan yang tidak terbas dan sangatlah manusiawi jika manusia berupaya memenuhi kebutuhannya itu dengan segala cara dan kelestarian menjadi urutan pertimbangan yang nyaris tidak diperhitungkan.

Untuk membatasi sikap dan prilaku yang dapat menimbulkan fenomena negatif terhadap kelestarian alam manusia dituntut untuk memiliki dan menggunakan "*etika*" sehingga manusia dapat memberikan respon terhadap apa yang perlu dipilih dan tindakan apa

yang perlu diambil pada situasi tertentu, etika yang ideal ini melahirkan norma-norma hukum ditengah masyarakat yang memberikan sanksi tegas terhadap siapa saja yang melanggarnya.

Pertanyaan timbul setelah bencana melanda, alam menunjukkan sikap tidak bersahabat, dan ternyata bencana itu timbul dan disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Lantas mengapa sebahagian kecil manusia Indonesia dapat leluasa merusak kelestarian alam, tidak adakah norma hukum yang membatasi mereka ?. Ada dua permasalahan penting tentang kepincangan hukum di Indonesia, disamping permasalahan yang lain :

1. Materi hukum.

Prosedur lahirnya hukum dan perundang-undangan di Indonesia dinilai kurang profesional dan sangat sederhana, sehingga banyak permasalahan aktual yang tidak dimuat, bahkan terkesan sengaja tidak dimuat, sehingga pada gilirannya terjadi bencana yang disebabkan oleh manusia, maka barulah difikirkan aturannya, karena belum ada Undang-undang yang mengaturnya, Peraturan perundang-undangan dapat saja direvisi dalam beberapa hari, tetapi alam lingkungan yang rusak memakan waktu panjang untuk utuh kembali, atau bahkan tidak akan pernah sama sekali. Beberapa hal yang direkomendasikan :

- Human resorce yang diberikan amanah dan kewenangan dalam menyusun materi aturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan haruslah mereka yang mempunyai kreteria mengerti dan memahami konsep keilmuan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan.
- Mengenyampingkan pengaruh politik untuk kepentingan golongan tertentu dalam tendensi pembuatan materi peraturan

perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.

2. Aparat penegak hukum.

Keberhasilan penegakan Hukum dan perundang-undangan ditengah masyarakat sangat ditentukan oleh ketegasan dan kemurnian sikap para penegak hukumnya. Peraturan perundang-undangan hendaklah berlaku secara universal tanpa pengecualian dan tanpa adanya tendensi-tendensi kepentingan didalamnya.

3. Kesamaan persepsi terhadap implementasi Otonomi Daerah.

Indonesia yang terdiri dari banyak propinsi, kota dan kabupaten mempunyai visi dan misi yang berbeda, akan tetapi tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan Otonomi daerah khususnya pengelolaan sumberdaya alam yang menjanjikan nilai nominal rupiah yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah, dan kepentingan-kepentingan politis lainnya persepsi yang seharusnya sama dalam implementasi Otonomi Daerah diupayakan bahkan terkesan dipaksakan keberpihakannya kepada Pemerintah daerah setempat dengan mengesampingkan kepentingan dalam skala nasional. Untukantisipasi terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat maka konsep bertindak lokal dan berfikir global memang adalah konsep yang tepat untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri**, 1957, UU Darurat No.11 Tahun 1957, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri**, 1982, Manual Administrasi Pendapatan Daerah. Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri**, 1999, UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri**, 2000, UU RI No. 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Barat**, 2002, Laporan Realisasi PemutihanPKBDan Denda BBNKB.
- Mangkoesebroto, G**, 2002, Ekonomi Publik, Edisi Ketiga, BPFE Yogyakarta.
- Suparmoko**, 2002, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama, Penerbit: Andi Yogyakarta.